

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2020 mengalami kesulitan karena dihadapkan dengan adanya virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Dengan adanya pandemi Covid-19 diseluruh dunia berdampak pada perekonomian. Dampak dari penurunan perekonomian sangat dirasakan oleh Masyarakat Indonesia terutama yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor UMKM tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia, karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara tersebut. Salah satu dampak pandemi Covid-19 yang merugikan UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak Covid-19 (Amri, 2020).

Meskipun sektor UMKM yang paling terkena dampak Covid-19 adalah makanan dan minuman, mayoritas koperasi yang terkena dampaknya bergerak di sektor kebutuhan sehari-hari. Para pengelola koperasi menghadapi penurunan pendapatan, kekurangan modal, dan terbatasnya distribusi. Menurut Kementerian Koperasi UMKM, ada sekitar 37.000 UMKM yang melaporkan bahwa pandemi ini memberikan dampak yang sangat serius bagi mereka. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 persen melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan masalah pembiayaan, 15% melaporkan masalah distribusi, dan 4% melaporkan kesulitan memperoleh bahan baku (Thaha, 2020).

Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, perekonomian Indonesia mencapai Rp19.588,4 triliun pada tahun 2022, dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022, melebihi kenaikan pada tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Lapangan Usaha Pengangkutan dan

Pergudangan mengalami peningkatan produksi terbesar yaitu sebesar 19,87 persen. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen pada triwulan IV tahun 2022 dibandingkan triwulan IV tahun 2021. Berikut merupakan tabel pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia:

**Tabel 1. 1 Perekonomian Indonesia Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam persen (%)
1.	2021 Triwulan IV	5,03
2.	2022 Triwulan I	5,02
3.	2022 Triwulan II	5,46
4.	2022 Triwulan III	5,73
5.	2022 Triwulan IV	5,01
6.	2023 Triwulan I	5,04
7.	2023 Triwulan II	5,17

*Sumber: Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Tahun 2023*

Bidang Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan produksi terbesar yaitu meningkat sebesar 16,99 persen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kenaikan terbesar dari sisi pengeluaran yaitu naik 14,93 persen. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,36 persen dari triwulan III tahun 2022 hingga triwulan IV. Kelompok usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kenaikan produksi terbesar yaitu sebesar 10,56 persen. Komponen Belanja Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan belanja terbesar yaitu meningkat sebesar 30,13 persen. Dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja perekonomian mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31 persen pada tahun 2022, gugusan provinsi di Pulau Jawa secara geografis akan mewarnai struktur dan kinerja perekonomian Indonesia. Secara spasial, perekonomian Indonesia terlihat mengalami penguatan di sejumlah daerah pada triwulan II tahun 2023. Dengan kontribusi sebesar 57,27 persen terhadap perekonomian nasional, gugus provinsi di Pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,18 persen dibandingkan triwulan II tahun 2022 (Bps.go.id, 2023).

Presiden Republik Indonesia mengarahkan pengembangan UMKM untuk Peningkatan dan Modernisasi Koperasi dalam upaya mewujudkan perekonomian kerakyatan. Dengan 99% dari seluruh unit usaha adalah UMKM, mereka memainkan peran penting dalam perluasan perekonomian Indonesia. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM menyumbang 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB juga mencapai 60,5%. Sebelumnya, pada dua tahun pertama pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020–2021, terjadi penurunan kondisi UMKM lokal. Berdasarkan survei UNDP dan LPEM UI terhadap 1.180 pelaku UMKM, ditemukan temuan bahwa saat ini lebih dari 48% UMKM mengalami permasalahan bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan permintaan produk, bahkan 97% mengalami penurunan nilai aset (Limanseto, 2022).

Komponen perekonomian Indonesia yang paling krusial adalah UMKM. Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah. Kemampuan UMKM dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan menghasilkan hingga 60,4% dari total investasi merupakan dua cara UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Namun, UMKM besar Indonesia tidak mungkin bisa dipisahkan dari kesulitan yang dihadapi negara ini. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program dukungan UMKM untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Kewirausahaan Alumni Kartu Prakerja Program melalui Pembiayaan KUR, dan juga mencakup strategi jangka panjang peningkatan kelas UMKM melalui Tangga Penciptaan Lapangan Kerja. Dampak lain dari pandemi ini adalah mendorong perubahan konsumsi barang dan jasa secara *offline* ke *online*, dengan peningkatan trafik internet sebesar 15-20%. Ini adalah tren yang akan mempercepat perubahan digital. Meskipun memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan

tingkat koneksi internet sebesar 196,7 juta orang, potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar (Limanseto, 2021).

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada pasal 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM maka perlu adanya digitalisasi dalam pemasaran UMKM. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 10 yaitu yang berbunyi: a.) membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b.) mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu, dan; c.) memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Kemampuan menjalankan usaha di masa pandemi Covid-19 saat ini yaitu “Digitalisasi UMKM” yang bisa diklaim semakin diperluas menjadi solusi agar UMKM tetap bertahan, tentu menjadi permasalahan yang sangat berat bagi para pelaku UMKM. Pergerakan menuju upaya digitalisasi UMKM tentu merupakan salah satu tantangan yang sulit untuk dicapai. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan yang berkembang bisa disebabkan oleh banyak hal yang berbeda-beda. Salah satunya adalah banyaknya cara mengonsumsi produk dan jasa yang dilakukan secara offline atau dijual langsung sebelum pandemi. Meskipun hal ini terjadi, sebagian besar pembelian produk dan layanan selama pandemi dilakukan secara *online*, khususnya melalui e-commerce. Kenyataan ini setidaknya menjadi pengingat bahwa pola konsumsi masyarakat memang sedang mengalami perubahan. Di tengah kelangsungan dan menunjang perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus melakukan digitalisasi dengan beralih ke pola penjualan *online* melalui *marketplace* (Wijoyo & Widiyanti, 2020).

**Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di DIY Kategori Skala Usaha**

<b>Kategori</b>	<b>Tahun 2021 (Unit)</b>	<b>Tahun 2022 (Unit)</b>	<b>Tahun 2023 (Unit)</b>
Usaha Mikro	318.892,00	324,745,00	329.132,00
Usaha Kecil	16.061,00	16.069,00	16.069,00
Usaha Menengah	2.107,00	2.110,00	2.109,00
<b>Jumlah</b>	<b>337.060,00</b>	<b>342.924,00</b>	<b>347.310,00</b>

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2023*

Pada data tabel tersebut menyebutkan bahwa UMKM yang berada diwilayah Yogyakarta berdasarkan skala usaha yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dari Data tersebut memaparkan usaha mikro memiliki jumlah usaha terbanyak pada tahun 2021 dengan jumlah 318.892 unit kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan jumlah 324,745 unit dan pada tahun 2023 berjumlah 329.132 unit. Sedangkan untuk usaha kecil menempati peringkat kedua dengan jumlah 16 ribu lebih unit usaha pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 hanya meningkat 8 unit usaha. Usaha menengah menempati peringkat terakhir dengan jumlah usaha paling sedikit pada tahun 2021 dengan jumlah 2 ribu lebih unit usaha, dan pada tahun 2022 dengan jumlah 2.110 unit usaha (Bappeda.jogjaprovo.go.id, n.d.).

**Tabel 1. 3 Pertumbuhan UMKM Bantul**

<b>No.</b>	<b>Jenis UMKM</b>	<b>Jumlah</b>
1	Usaha Mikro	46.626
2	Usaha Kecil	1.428
3	Usaha Menengah	60
4	Status Kosong	1.784
<b>Total UMKM yang terdaftar</b>		<b>49.898</b>

*Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Tahun 2021*

Menurut data tabel tersebut usaha mikro di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 memiliki jumlah paling banyak yaitu 46.626 unit, usaha kecil berjumlah 1.428 unit usaha, sedangkan usaha menengah paling sedikit dengan jumlah 60 unit usaha. Selain itu informasi tersebut menunjukkan, ada 1.784 UMKM yang masuk dalam kategori status kosong. Hal ini

menunjukkan beberapa UMKM gulung tikar di masa pandemi COVID-19 bahkan dinyatakan bangkrut karena kehilangan pendapatan dan penurunan penjualan. Dinas KUMKP dan OPD terkait menggunakan informasi dan aspirasi seperti ini untuk mengembangkan kebijakan dan mengidentifikasi cara terbaik mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 terhadap UMKM (Kharisman & Atmojo, 2021).

Pemerintah Provinsi Yogyakarta membuat platform digital berupa Sibakul Jogja yang memuat terkait dengan pembinaan serta pengembangan koperasi dan UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Selain itu program sibakul digunakan sebagai fasilitasi pemasaran produk-produk UMKM yang ada di wilayah Yogyakarta. Sibakul awalnya diperkenalkan pada bulan September 2019 dan diciptakan sebagai sebuah inovasi untuk membantu dalam mengelola data UMKM, memilih program pelatihan UMKM, dan membuat kurikulum berdasarkan keterampilan dan kebutuhan UMKM itu sendiri. Sibakul juga menjadi wadah bagi UMKM untuk mengiklankan produknya secara *online*. Penemuan ini tercipta karena terbatasnya kemampuan UMKM untuk beroperasi secara digital, terutama dalam hal memasukkan teknologi ke dalam operasi kecil. Guna membantu UMKM DIY bertahan di tengah pandemi Covid-19, transformasi digital bagi UMKM juga menjadi salah satu cara untuk mendongkrak daya saing antara UMKM dengan UMKM dari daerah lain. Selain itu, Sibakul Jogja juga menyediakan opsi pengiriman gratis yang dapat menarik lebih banyak pelanggan ke tokonya. Oleh karena itu, penerapan opsi pengiriman gratis secara tidak langsung menguntungkan UMKM dan masyarakat umum dengan meningkatkan penjualan produk dan memungkinkan pelanggan membeli barang tanpa harus membayar ongkos kirim (Prabandari & Atmojo, 2022).

**Tabel 1. 4 Jumlah UMKM berdasarkan wilayah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Kabupaten Gunungkidul	113.299
2.	Kota Yogyakarta	86.675
3.	Kabupaten Bantul	53.855
4.	Kabupaten Sleman	35.916
5.	Kabupaten Kulon Progo	32.440
<b>Jumlah</b>		<b>337.465</b>

*Sumber: Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY, Tahun 2021*

Menurut data tersebut lima kabupaten atau kota di Yogyakarta masih memiliki konsentrasi UMKM yang masing-masing memiliki persentase UMKM di atas 97%, menurut data Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dengan jumlah UMKM sebanyak 84.994 UMKM, Kabupaten Sleman menjadi yang terbanyak, sedangkan Kabupaten Bantul berada di urutan kedua dengan jumlah UMKM sebanyak 77.329 UMKM. Kabupaten Kulonprogo berada di urutan kedua dengan 35.918 unit, disusul Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 53.859 unit. Kota Yogyakarta yang memiliki kepadatan paling rendah sebanyak 32.446 unit. Berdasarkan informasi mengenai UMKM menurut Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2021 menyusul penyesuaian klasifikasi jenis perusahaan pada Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Berdasarkan data Kota Yogyakarta memiliki jumlah UMKM paling sedikit, sedangkan Kabupaten Sleman memiliki jumlah UMKM terbanyak. Data ini terdapat 18.249 unit yang tidak dapat ditentukan karena sebagian pengusaha beroperasi di sektor DIY dengan menggunakan KTP dari luar DIY (Bappeda.jogjapro.go.id, 2022).

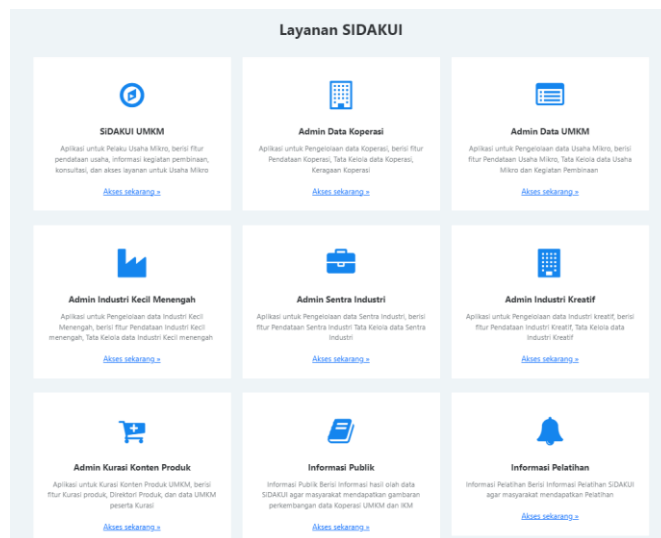
Selama dua tahun terakhir, Pemda DIY berhasil menggerakkan perekonomian daerah (DIY) hingga Rp 50 miliar melalui program SiBakul Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jumlah tersebut diperoleh dari pembelian dan penjualan barang UMKM DIY gratis ongkir menggunakan aplikasi SiBakul. Dengan bantuan dana sebesar Rp6 miliar dari Pemda DIY, gratis ongkos kirim ini bisa terwujud. Hal ini semakin memperkuat perkiraan persentase

pertumbuhan PDB pada tahun 2022 yang diproyeksikan berkisar antara 4,9 hingga 5,7%. Namun, meski dibayangi krisis ekonomi global, kekuatan tersebut diharapkan dapat menopang kuatnya ketahanan ekonomi DIY pada tahun 2023 (Jogjaprov.go.id, n.d.).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat inovasi berupa program Sibakul Jogja dalam mengatasi permasalahan terkait UMKM di wilayah Yogyakarta. Trobosan inovasi serupa juga dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi permasalahan UMKM di wilayahnya dengan melakukan inovasi dengan membuat SIDAKUI.

SIDAKUI merupakan kependekan dari “Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Industri” yang diterapkan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul yang di *launching* pada tanggal 18 Juni 2021. DKUKMPP Kabupaten Bantul menjadikan SIDAKUI sebagai langkah strategis untuk mewujudkan satu data perdagangan, koperasi, UMKM, dan UKM di Kabupaten Bantul. Serta sebagai wujud komitmen modernisasi kegiatan Pengembangan Koperasi UMKM dan IKM yang dilakukan DKUKMPP Kabupaten Bantul agar dapat berjalan lebih efisien, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan (SIDAKUI.kab-bantul.id, n.d.).

**Gambar 1. 1 Layanan SIDAKUI**



Sumber: Website SIDAKUI



Dalam SIDAKUI terdapat beberapa layanan terkait dengan UMKM diantaranya SIDAKUI UMKM, admin data koperasi, admin data UMKM, admin industri kecil menengah, admin sentra industri, admin industri kreatif, admin kurasi konten produk, informasi publik, dan informasi pelatihan. Data 349 koperasi, 86.316 UKM, 11.253 IKM, lengkap dengan nama, alamat, NIK, usaha, dan lain-lain, hingga 91 unsur, telah terdaftar menggunakan SIDAKUI. Keterkaitan data dengan SIBAKUL dan SILDASI yang dioperasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menjadi salah satu ciri khas SIDAKUI. Fitur lainnya antara lain pengumpulan data Koperasi UKM dan Industri, pengelolaan data UKM DAN IKM berbasis klaster, direktori produk usaha mikro, dan integrasi data dengan SIBAKUL (Bantulpedia.bantulkab.go.id, 2021).

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bantul pada tahun 2022, jumlah UMKM tahun 2021 skala usaha mikro meningkat menjadi sebanyak 86.413 dan sampai akhir 2022, tercatat di SIDAKUI sebesar 86.833 pelaku usaha mikro. Jumlah usaha mikro ini mengalami peningkatan karena dengan ketentuan dalam PP 7 tahun 2021, usaha mikro menurut skala usaha mensyaratkan modal dibawah 1 milyar masuk dalam kategori usaha mikro.

**Tabel 1. 5 Pertumbuhan UMKM Tahun 2020-2022**

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro	30.486	86.413	86.833
2.	Usaha Kecil	12.201	-	-
3.	Usaha Menengah	7.114	-	-
Jumlah		49.801	86.413	86.833

*Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2022*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 jumlah usaha mikro sebesar 49.801, sedangkan pada tahun 2021 usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro sebesar 86.413 unit usaha, suatu peningkatan jumlah yang tinggi. Hal ini disebabkan kriteria usaha yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan modal usaha yang dimiliki, usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro (DKUKMPP, 2022).

Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mencapai 86.833. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh antara lain pemulihan positif ekonomi pasca dari pandemi tahun 2020 – 2021, kemudahan perizinan usaha khususnya usaha mikro, perkembangan TI (Teknologi Informasi) dalam skala usaha melalui pemasaran *online* dan kreativitas dengan teknologi memberikan memudahkan akses bagi kaum muda masuk dalam usaha skala mikro. Selain itu dengan SIDAKUI membantu dalam pendataan UMKM sehingga dapat membantu UMKM dalam kegiatan pembinaan, konsultasi, dan layanan usaha mikro (SIDAKUI.kab-bantul.id, n.d.).

Sejalan dengan pertumbuhan pelaku usaha mikro dan kemauan serta keinginan pemerintah daerah untuk mengangkat kesejahteraan, penting untuk mengetahui peningkatan kualitas UMKM dengan tolok ukur UMKM yang meningkat omset dan asetnya. Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diharapkan ada kenaikan grade atau kelas. UMKM naik kelas dalam pengukuran ini adalah UMKM binaan yang meningkat omset dan asetnya. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 70 persen dapat direalisasi sebesar 70,1 persen tercapai 100,1.% atau setara dengan 287 UMKM meningkat omset dan asetnya dari 410 UMKM yang dibina. Capaian kinerja sebesar 100,1 % ini bernilai kinerja “Sangat Tinggi” (DKUKMPP, 2022).

Dalam rangka melakukan updating data usaha mikro dan pelaku usaha sektor lain yang terdata dalam SIDAKUI, sistem data di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Koordinasi yang telah dilakukan antara lain dengan Dinas Kominfo, dan Bagian LPBJ setda dalam rangka *update*

pelaku usaha yang masuk BOS (Bantul Online Shop). Dengan demikian UMKM yang sudah terdaftar dan terdata di SIDAKUI dapat meningkatkan pemasaran UMKM melalui BOS (Dkukmpp.bantulkab.go.id, 2023).

Berdasarkan uraian diatas bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul membuat sebuah inovasi salah satunya yaitu SIDAKUI. SIDAKUI merupakan kependekan dari Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Industri. Inovasi tersebut merupakan bentuk dari digitalisasi administrasi yang ditujukan untuk koperasi dan UMKM di Kabupaten Bantul. Transformasi digital yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul yang mencakup kegiatan pendataan dan kelastering, pelatihan, kurasi produk dan penumbuhan koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai SIDAKUI, hal tersebut diperkuat dengan belum adanya penelitian sebelumnya yang meneliti terkait SIDAKUI di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul. Untuk itu penelitian ini berjudul **“Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Data Perdagangan Koperasi UKM Dan Industri “SIDAKUI” Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023”**. Dengan penelitian ini agar dapat ditarik kesimpulan mengenai inovasi SIDAKUI dan hasil dari inovasi SIDAKUI yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu pengembangan UMKM di Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas fokus maupun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi SIDAKUI yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam peningkatan kesejahteraan UMKM di Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi inovasi pelayanan SIDAKUI dalam upaya peningkatan kesejahteraan UMKM di Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan suatu pemikiran bagi SIDAKUI agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan sesuai dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melengkapi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan inovasi dalam digitalisasi peningkatan UMKM.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait dengan pelaksanaan inovasi pelayanan dalam digitalisasi UMKM.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi instansi terkait mengenai pentingnya digitalisasi dalam peningkatan UMKM.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat serta sebagai informasi terkait dengan digitalisasi UMKM guna meningkatkan UMKM.

## E. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
1.	(Prabandari & Atmojo, 2022)	TheJournal: Social and Government	Implementasi Platform Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Menemukan beberapa fakta yaitu Implementasi SiBakul Jogja Free sudah memiliki manfaat, tujuan dan sasaran yang jelas bagi keberlangsungan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kegiatan sosialisasi belum maksimal; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih minim sumber daya manusia untuk menjalankan SiBakul Jogja Free Ongkir sehingga melakukan perekrutan tenaga tambahan dari luar; Para implementor telah memiliki disposisi yang baik; Pelaksanaan SiBakul menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai jasa pengiriman sehingga memudahkan dalam akses pengiriman produk-produk UMKM.
2.	(Ramdani, 2021)		Strategi Pengembangan Sektor Usaha di Bidang UKM melalui Program Sibakul Jogja di Dinas Koperasi dan UKM DIY	Strategi pengembangan sektor usaha UKM yang sudah terdaftar SiBakul dilakukan dengan memasarkan produknya melalui MarketHub serta mengikuti kelas bisnis selasa pagi (KBSP) untuk meningkatkan UKM agar mampu bersaing dan merubah strategi dengan para UKM lainnya. Dengan cara pengembangan sektor usaha ada juga hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sektor usaha

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
				UKM salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat tentang digitalisasi, dan kurangnya inovasi sehingga masyarakat susah untuk memajukan usaha tersebut.
3.	(Amelia et al., 2019)	Prosiding SNATIF	E-UMKM: Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Android Sebagai Strategi Meningkatkan Perekonomian Indonesia	Perlunya strategi dan inovasi pengembangan UMKM melalui E-UMKM, aplikasi pemasaran produk umkm berbasis android sebagai langkah prospektif meningkatkan perekonomian Indonesia. Tahapan yang harus dilakukan meliputi pendataan, sertifikasi produk UMKM, pembuatan aplikasi, sosialisasi, hingga sistem pengiriman barang. Menghadapi tantangan ekonomi digital, Indonesia harus mempunyai strategi pemasaran dan kebijakan yang efektif, pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat mengenalkan, mempromosikan, dan menjaga eksistensi UMKM Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian nasional.
4.	(Wijoyo & Widiyanti, 2020)	Seminar Nasional Kahuripan	Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Pandemi Covid-19	Digitalisasi UMKM yang beralih ke pola penjualan secara <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> menjadi suatu solusi bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk tetap bertahan hidup dan menopang perekonomian Indonesia pada era pandemi Covid-19. Strategi digitalisasi UMKM sebagai solusi yang diperlukan dalam meningkatkan perekonomian, menggunakan strategi SWOT dalam pemasaran UMKM,

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
				dan perlu adanya sosialisasi serta pelatihan oleh pemerintah.
5.	(Amri, 2020)	Jurnal Brand	Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia  Link jurnal: <a href="https://ejournal.s.umma.ac.id/index.php/brand">https://ejournal.s.umma.ac.id/index.php/brand</a>	Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi termasuk pasar ritel. Karena pandemi Covid-19, satu persatu pasar ritel modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai mengalami penurunan penghasilan. Pandemi mengakibatkan menurunnya kapasitas produksi dan penghasilan pada UMKM, dan memerlukan kebijakan untuk keberlangsungan UMKM agar tetap berjalan selama pandemi Covid-19.
6.	(Rosita, 2020)	Jurnal Lentera Bisnis	Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia  Link jurnal: <a href="https://scholar.archive.org/work/vlltc3lx4vgt/nfnvkucdp5je2y/access/wayback/https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/download/380/316">https://scholar.archive.org/work/vlltc3lx4vgt/nfnvkucdp5je2y/access/wayback/https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/download/380/316</a>	Industri yang mampu bertahan di masa pandemi covid-19 adalah, UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi. Serta industri ritel yang mampu bertahan, hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital. Pandemi covid-19 mempengaruhi keberlanjutan UMKM karena terdapat penurunan terkait dengan pasokan, kapasitas produksi, kerugian UMKM hingga penutupan pabrik, sehingga perlunya strategi dalam membangkitkan UMKM agar dapat berjalan seiring dengan pandemi covid-19 di Indonesia.
7.	(Kharisman & Atmojo, 2021)	Jurnal Ilmu	Responsivitas Dinas Koperasi,	Pemerintah daerah yang menjalankan dan mengatur pemerintahan di daerah

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
		Administrasi Negara	UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19	memegang peran yang juga penting dalam menangani dan mengurangi dampak akibat pandemi Covid-19. Dinas KUKMP Kabupaten Bantul cukup responsif dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, terutama pada aspek sikap dan pembuatan kebijakan yang mengacu pada permasalahan serta keluhan UMKM di Kabupaten Bantul. Terdapat satu aspek yang harus ditingkatkan yaitu terkait penempatan dan keikutsertaan UMKM pada sistem pelayanan dalam hal ini kebijakan dan kegiatan atau program yang dijalankan.
8.	(Kadeni & Srijani, 2020)	EQUILIBRIUM	Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Perhatian pemerintah terhadap pentingnya peran dan keberadaan para usahawan UMKM dibuktikan dengan adanya wadah UMKM dan Koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdampak langsung terhadap tingkat kehidupan masyarakat kalangan bawah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Peran UMKM juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yaitu: a. sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan; b. sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil; c. Memberikan pemasukan devisa bagi negara.
9.	(Zaelani, 2019)	Jurnal Transborder	Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia:	Persoalan yang muncul dalam pengembangan UMKM di Indonesia terkait dengan pembiayaan, pembangunan



No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
			Tantangan dan Peluang Pengembangan IPTEK	infrastruktur usaha, sarana fisik dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, adanya masalah dalam memberikan kemudahan penyelenggaraan usaha, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masih besarnya keran impor yang dibuka. UMKM di Indonesia memiliki kinerja yang baik dan dapat berkembang namun dalam peningkatan UMKM di Indonesia terdapat hambatan dalam pengembangan inovasi terkait dengan kebijakan maupun dukungan dari pemerintah. Pengembangan inovasi akan memberikan dampak terhadap produktifitas UMKM.
10.	(Windusano, 2021)	Mimbar Administrasi	Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia	Kemampuan beradaptasi dalam strategi penjualan baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> , dapat membantu UMKM mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Pemerataan ekonomi dapat segera dicapai dengan menetapkan skema pendanaan bagi koperasi dan UMKM sesuai kebutuhan, membentuk klaster untuk mendorong kinerja produksi dan usaha agar lebih efisien dan berdaya saing tinggi, melakukan pengembangan kemitraan jaringan usaha, dan pemerintah berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern dalam regulasi.
11.	(Prabowo Setiawan & Syafirullah, 2018)	Jurnal Infotekmesin	Rancang Bangun Sistem Informasi Usaha Mikro	Informasi tentang UMKM sangat dibutuhkan oleh Dinas Koperasi UMKM dalam menentukan arah

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
			Kecil Menengah Studi Kasus Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta	pengembangan UMKM. Data yang akurat akan memberikan dampak yang tepat dalam menentukan program pengembangan serta pelayanan bagi pelaku UMKM. Maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya Sistem Informasi untuk mengelola data UMKM. Sistem yang dapat mempermudah pengelolaan data, mempercepat proses pencarian data, menggolongkan menurut kriteria sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan pelayanan UMKM serta membantu konsultan dinas koperasi dalam proses konsultasi bisnis.
12.	(Laraswati & Niswah, 2021)	Jurnal Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara	Inovasi Layanan Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Rakyat Pedagog Cerdas) Dalam Peningkatan Eksistensi Pasar Tradisional Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	Komponen budaya inovatif Diskopindag Kota Malang setiap minggunya selalu memberikan materi baru untuk Sepasar pedas. Komponen, kepemimpinan Diskopindag Kota Malang bertanggung jawab sebagai koordinator yang memajemen seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program Sepasar Pedas. Pada Komponen pengetahuan ahli yaitu pegawai di Diskopindag Kota Malang dibidang perdagangan, yang didalamnya terdiri dari seksi atau sub bidang yang nantiya membantu Sepasar Pedas. Komponen keterlibatan stakeholders Diskopindag Kota Malang melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan dan Bank

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
				Jatim. Dan pada komponen desain kerja inovatif Diskopindag Kota Malang dengan telah melakukan kerja sama yang baik dan pedgang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya inovasi ini
13.	(Narasmita & Fanida, 2019)	Jurnal Publika	Efektivitas Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (Siladamas) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban untuk Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (SILADAMAS) ini dapat memudahkan administrator Siladamas, operator pasar, serta pedagang pasar dalam menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel. Hambatan yang muncul pada penerapan Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (SILADAMAS) sebagian besar dikarenakan dari masyarakat pasar sendiri yang kurang memahami perkembangan teknologi informasi.
14.	(Sari et al., 2022)	Jurnal Inovasi Penelitian	Strategi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi	Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian telah berjalan dengan baik. Meskipun sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika dianalisis berdasarkan teori Fred. R. David dan Forest. R. David (2016) masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni adanya keterbatasan mengenai kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan efek dari adanya pandemi covid-19. Sehingga dapat dipahami bahwa strategi yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaannya.

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul	Hasil Temuan
15.	(Sari et al., 2022)	Jurnal Enersia Publika	Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman	Pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sudah berjalan optimal. Dengan adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu pada aspek informasi, forum komunikasi dan forum kemitraan, izin usaha melalui One Single Submission (OSS). Faktor pendukung pemberdayaan UMKM meliputi kesiapan pelatihan UMKM, bantuan modal, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran dan SDM.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan UMKM diatas terdapat perbandingan diantaranya menunjukkan beberapa penelitian terhadap dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia sebagai latar belakang masalah. Sehingga beberapa penelitian menyebutkan perlu adanya upaya untuk meningkatkan UMKM yang terdampak pandemi karena mengalami kesulitan. Meninjau dari permasalahan tersebut penelitian lainnya membahas pentingnya pengembangan UMKM melalui program digitalisasi. Selain itu terdapat penelitian yang meneliti terkait peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM dengan menciptakan inovasi melalui program digitalisasi dalam pengembangan UMKM. Pentingnya UMKM berperan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu pada era modern ini diperlukan adanya digitalisasi dalam UMKM.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu tersebut sebagai acuan dalam meneliti program inovasi yang serupa. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya berupa objek yang diteliti yaitu SIDAKUI, instansi pemerintah adalah Dinas Koperasi dan UKM, dan lokasi penelitian yang berada di Kabupaten

Bantul. Dengan perbedaan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah karena belum ada penelitian terdahulu yang membahas SIDAKUI yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM melalui digitalisasi dalam peningkatan kesejahteraan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Inovasi**

#### **a. Pengertian Inovasi**

Berdasarkan studi yang dilakukan Baregheh et al. (dalam Arman, 2016) memberikan analisis berdasarkan 60 definisi dari berbagai macam paradigma dan disiplin keilmuan yang berbeda. Diperoleh 22 kata kunci yang sering disebutkan sebagai representasi dari definisi inovasi. Inti dari inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi. Inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan, yang direpresentasikan pada layak jual atau tidaknya produk atau jasa inovatif tersebut. Sehingga inovasi berhubungan dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan maupun keinginan konsumen. Selain itu juga berkaitan dengan sikap kreatif, yang dikemas dan disampaikan melalui sarana teknologi yang lebih baik (Nasution & Kartajaya, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) inovasi dikatakan sebagai suatu pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru yang dijadikan sebagai pembaharuan, yang mana penemuan baru tersebut berbeda dari yang sudah ada maupun yang sudah dikenal sebelumnya.

Terkait dengan definisi inovasi, berikut adalah beberapa definisi yang ada mengenai inovasi:

- 1) **Joseph Schumpeter (1934)**, inovasi merupakan produk baru, metode produksi baru, sumber suplai baru, membuka pasar baru, dan menjalankan organisasi baru atau cara baru mengorganisir bisnis.

- 2) **Everett M. Rogers (1983)**, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.
- 3) **Stephen Robbins (1994)**, inovasi didefinisikan sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk maupun proses dan jasa.
- 4) **Amabile et al. (1996)**, inovasi (innovation) merupakan perubahan atau memperkenalkan suatu hal yang baru, atau suatu penemuan berupa *discovery* atau invensi dalam mencapai tujuan dalam pemecahan masalah.
- 5) **Van de ven, Andrew H**, inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam organisasi.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kebermanfaatan, ekonomi dan atau sosial.

#### **b. Karakteristik Inovasi**

Berdasar pada beberapa definisi diatas maka inovasi memiliki karakteristik menurut (Rogers et al., 2005) sebagai berikut:

- 1) Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Suatu inovasi harus lebih unggul dari inovasi sebelumnya dalam hal manfaat dan nilai. Inovasi mempunyai nilai kebaruan yang selalu ada dan berfungsi membedakannya dari gagasan lain.
- 2) Kesesuaian (Compatibility), Inovasi harus sejalan atau melengkapi inovasi yang digantikannya. Selain unsur biaya yang tidak sedikit, hal ini dilakukan agar ide-ide sebelumnya tidak dibuang begitu saja dan untuk memastikan ide-ide tersebut dimasukkan

dalam proses peralihan ke teknologi terkini. Selain itu, dapat mempercepat proses adaptasi dan pembelajaran yang mengarah pada inovasi.

- 3) Kerumitan (Complexity), Inovasi memiliki tingkat kompleksitas yang mungkin lebih tinggi dibandingkan inovasi sebelumnya karena sifatnya yang baru. Namun, tingkat kerumitan ini biasanya bukan masalah besar, karena sebuah penemuan memberikan cara yang segar dan lebih baik.
- 4) Kemungkinan dicoba (Triability), Inovasi hanya dapat disetujui jika telah diuji dan terbukti mengungguli inovasi sebelumnya dalam hal manfaat atau nilai. Oleh karena itu, suatu produk inovasi harus melalui tahap “pengujian publik” ketika ada orang atau pihak yang dapat menilai kualitas inovasi tersebut.
- 5) Kemudahan diamati (Observability), Inovasi yang dimodifikasi tersebut harus dapat dilihat dari sudut pandangnya masih berfungsi dan berpotensi menghasilkan inovasi yang lebih baik. Inovasi adalah pendekatan baru terhadap proses yang telah ditetapkan yang menghasilkan perbaikan.

### **c. Tipologi Inovasi**

Tipologi inovasi dijelaskan oleh Halvorsen, 2005 dalam (Suwarno, 2008) bahwa penggunaan tipologi dalam tujuan kita sebagai berikut:

- 1) Inovasi proses, melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan produk jasa dan proses produksi, termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
- 2) Inovasi delivery, pelayanan baru atau cara yang diperbaiki dalam menyelesaikan masalah atau memberikan pelayanan.
- 3) Inovasi administratif, termasuk cara baru berdasar instrumen kebijakan baru sebagai hasil perubahan kebijakan.
- 4) Inovasi konseptual, dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan rasional baru.

#### **d. Kategori Inovasi**

Kategori inovasi menurut (Halvorsen et al., 2005) inovasi dikategorikan sebagai berikut:

- 1) *Incremental innovations-radical innovations*. Inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (novelty) dari inovasi itu sendiri. Di sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat perbaikan incremental
- 2) *Top-down innovations and bottom-up innovations*. ini untuk menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan perilaku. Top berarti manajemen atau organisasi atau hirarkhi yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit (mid-level policy makers).
- 3) *Needs-led innovations and efficiency-led innovation*. Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Pasal 6 bahwa inovasi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;



- d. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

## **2. Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kesejahteraan sebagai hal atau keadaan sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, keselamatan, ketentraman, yang mana terlepas dari segala macam gangguan. Kesejahteraan berdasar undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Todaro dan Smith (2004) dalam (Kadeni & Srijani, 2020), telah menjelaskan bahwa upaya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yang mendasar yaitu:

- a) Tingkat Kebutuhan Dasar, dengan adanya peningkatan dalam kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.
- b) Tingkat kehidupan, dengan adanya peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c) Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa, dengan adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan UMKM memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan dan angka pengangguran. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan meningkatnya akses terhadap layanan dasar. Menurut (Wijoyo et al., 2021) pemerintah telah menetapkan sasaran indikator yang menjadi arah pendekatan pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat diantaranya:

- a) Percepatan peningkatan ekonomi;
- b) Penciptaan lapangan pekerjaan; dan
- c) Penanggulangan kemiskinan.

### **3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian UMKM**

Pengertian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, atau badan usaha perorangan, maupun cabang yang memiliki skala usaha yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai bermanfaat bagi penguatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan statistik yang ada, UMKM diyakini memiliki potensi yang cukup besar. Manfaat UMKM dalam menghadapi badai krisis disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM biasanya memproduksi barang dan jasa untuk konsumen yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua, UMKM lebih memanfaatkan sumber daya lokal, antara lain sumber daya manusia, modal, bahan baku, dan peralatan, dibandingkan mengandalkan bahan baku impor. Ketiga, perusahaan UMKM seringkali memiliki belanja modal yang rendah. Berkat manfaat ini, UMKM tidak terlalu terpengaruh oleh krisis global dibandingkan bisnis besar, yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah.

#### **b. Kriteria UMKM**

Berdasarkan kriterianya UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 6 yang tertulis:

- 1) Usaha Mikro
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 2) Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## 3) Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah batasan pengertian mengenai suatu konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan disini adalah unsur pokok yang dipergunakan dalam penelitian. Penulis mengembangkan definisi konseptual penelitian untuk meminimalkan interpretasi yang menyimpang sebagai berikut:

### 1. Inovasi Pelayanan

Inovasi pelayanan merupakan terobosan jenis pelayanan baik gagasan atau ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dinyatakan adanya peningkatan dari kehidupan sebelumnya pada kondisi yang layak bagi masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat mampu dalam pengembangan diri dan mampu memenuhi segala aspek kebutuhannya.

## 3. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh orang, kelompok, usaha kecil, atau rumah sebagai pengembangan potensi kemandirian yang berkembang di masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

## 4. SIDAKUI

Sistem Informasi Data Perdagangan Koperasi UKM dan Industri (SIDAKUI) adalah suatu sistem informasi data sebagai upaya untuk mewujudkan satu data perdagangan, koperasi, UMKM, dan IKM.

## H. Defisini Operasional

Definisi operasional memberikan pengukuran terhadap variable yang telah di tentukan dalam penelitian pada definisi konseptual. Berdasarkan dari beberapa teori yang ada di kerangka teori peneliti menggunakan teori inovasi pelayanan. Oleh karena itu peneliti menggunakan kajian berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 7 Tahun 2021 sebagai definisi operasional sebagai berikut:

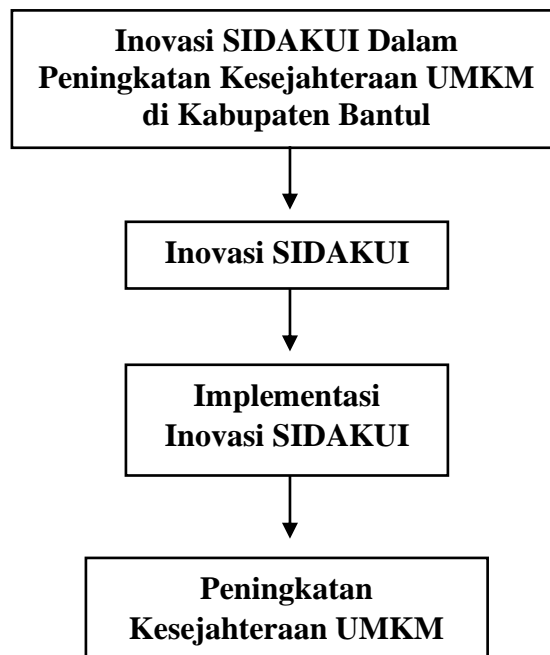
**Tabel 1. 7 Definisi Operasional**

No.	Teori	Variabel	Indikator
1.	Inovasi Pelayanan (Berdasarkan PERMANPAN-RB Nomor 7 Tahun 2021)	Memiliki Kebaharuan	1. Menghasilkan produk baru. 2. Menghasilkan hal baru yang sudah ada sebelumnya.
		Efektif	1. Inovasi berjalan dan berhasil.

			2. Inovasi memiliki hasil nyata dan terlihat.
		Bermanfaat	1. Inovasi dapat menjadi solusi dari permasalahan. 2. Memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
		Dapat ditransfer / direplikasi	1. Inovasi dicontoh dari organisasi lain. 2. Inovasi dapat dicontoh oleh organisasi lain.
		Berkelanjutan	1. Berjalan dan berlanjut dalam program atau kegiatan. 2. Terdapat dukungan dari program, anggaran, dan sarana prasarana.
2	Kesejahteraan	Peningkatan Pendapatan	1. Percepatan peningkatan ekonomi. 2. Penciptaan lapangan pekerjaan. 3. Penanggulangan kemiskinan.

### I. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian terdapat diagram yang digunakan untuk menjelaskan secara garis besar terkait dengan alur logika dalam penelitian.



## **J. Metode Penelitian**

Dalam penelitian penting adanya metodologi yang ditentukan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai arah berpikir yang sistematis untuk memperoleh hasil yang baik secara ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan (Anggito & Setiawan, 2018) metode kualitatif suatu teknik pengumpulan data deskriptif dengan prosedur dalam pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran situasi maupun keadaan suatu objek penelitian, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, dokumentasi resmi dan lainnya. Dengan penelitian deskriptif dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan fakta yang sebenarnya, sifat, dan hubungan antara beberapa fenomena yang sedang diteliti.

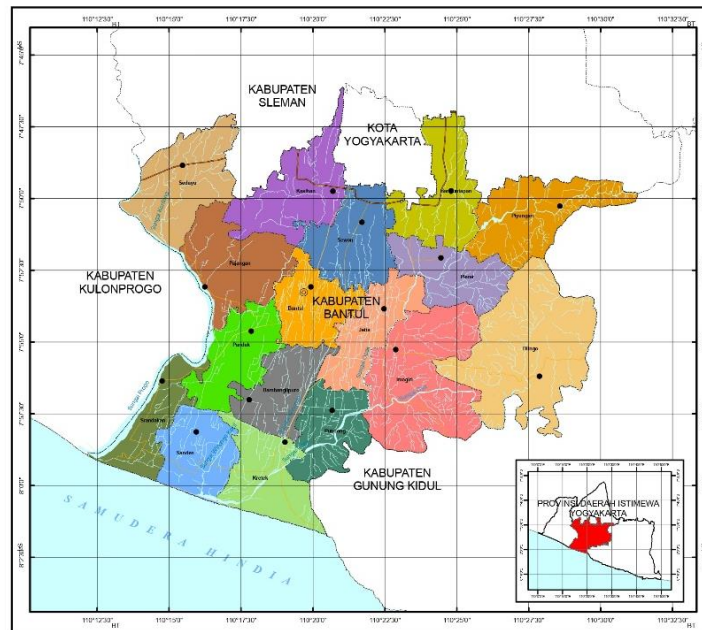
Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan secara mendalam mengenai upaya inovasi SIDAKUI yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan peningkatan UMKM di Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti lebih mudah mendapatkan data pada kegiatan pengembangan UMKM melalui SIDAKUI dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Bantul oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul. Adapun data yang dikumpulkan yaitu mengenai inovasi SIDAKUI dalam melakukan peningkatan UMKM dan bagaimana hasilnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka lokasi untuk analisis penelitian penulis memilih di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena Kabupaten Bantul memiliki UMKM yang cukup beranekaragam sehingga perlu dilakukan adanya berbagai

inovasi terkait dengan peningkatan digitalisasi UMKM agar menjadi lebih baik dan dapat menjadi contoh oleh daerah-daerah lain terutama di wilayah Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul.

**Gambar 1. 2 Peta Lokasi Penelitian**



*Sumber: [geoportal.bantulkab.go.id](http://geoportal.bantulkab.go.id)*

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian dibutuhkan adanya data yang akurat untuk dapat memberikan informasi yang valid terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan kedua jenis data untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat melalui proses terjun dilapangan atau bisa di bilang dengan peneliti datang langsung ke tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi ketempat yang menjadi studi kasus untuk mendapatkan data yang didapatkan langsung dari sumbernya dan sesuai



dengan pengertian data primer. Data utama yang diperoleh secara langsung dari responden berupa catatan tertulis hasil dari wawancara, serta dokumentasi dari pihak yang bersangkutan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul dan foto kegiatan di lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa media yang diperoleh dari pihak kedua, data ini digunakan sebagai data pendukung informasi terkait dengan penelitian yang sesuai dengan jenis data primer melalui jurnal, buku, arsip laporan, dan lainnya. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dalam jurnal-jurnal penelitian serupa terkait dengan inovasi seperti Sibakul Jogja. Hal ini dikarenakan belum terdapat penelitian terdahulu terkait dengan penelitian inovasi SIDAKUI Kabupaten Bantul.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam penelitian ini diperlukan data yang objektif, Adapun data yang diperoleh dengan cara:

#### a. Wawancara

Menurut (Rachmawati, 2007) metode pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Untuk memperoleh data yang akurat dibutuhkan adanya wawancara terhadap narasumber agar dapat mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam, karena Teknik ini berfungsi untuk mendapatkan keterangan secara tanya jawab serta bertatap muka antara pewawancara dan informan. Berikut beberapa informan yang di wawancarai oleh peneliti pada saat melakukan penelitian diantaranya:

**Tabel 1. 8 Wawancara**

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Agus Sulistiyana, MM (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul)</li> <li>2. Sri Rusminiwati, S. IP, M. AP (Sub. Koord. Kel. Substansi Kemitraan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Usaha Mikro)</li> <li>3. Desi Fikiwijayanti (Pengelola/Admin SIDAKUI)</li> <li>4. Andri Anto (Pengelola Data UKM)</li> </ol>
2.	Pengguna SIDAKUI/Pelaku UMKM	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulyani (UMKM Ayuk Mete)</li> <li>2. Nana (UMKM Nana Production)</li> <li>3. Yani (UMKM Mina Mandiri)</li> <li>4. Rukiyati (UMKM 3D Ngudi Rejeki)</li> <li>5. Inah (UMKM Aneka Peyek Miroso)</li> </ol>

*Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2024*

**Tabel 1. 9 Bentuk Sumber Data Primer**

No.	Jabatan	Jenis Data		Teknik Pengambilan Data	
		Primer	Sekunder	Wawancara	Dokumentasi
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul	Primer	-	Wawancara	-
2.	Koordinator Bidang UKM	Primer	-	Wawancara	Dokumentasi
3.	Pengelola SIDAKUI	Primer	-	Wawancara	Dokumentasi
4.	Pengelola Data UKM	-	Sekunder	-	Dokumentasi
5.	Pengguna SIDAKUI/Pelaku UMKM	Primer	-	Wawancara	Dokumentasi

*Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2024*

b. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif dimana peneliti datang melakukan pengamatan namun tidak ikut terlibat. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung datang ke lokasi penelitian yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan setelah wawancara dan observasi ke lapangan, peneliti mencari dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode ini dapat berbentuk gambar maupun lainnya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil dokumentasi secara pribadi berupa foto, website Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan bagaimana cara pemetaan, penguraian, perhitungan, serta pengkajian data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab sesuai dengan rumusan masalah dan menguji hipotesis yang ada dalam penelitian. Dalam analisis data informasi yang diperoleh peneliti menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman berdasarkan (Sugiyono, 2013) diantaranya:

a. Analisis Data

Menurut (Strauss & Corbin, 2003) Analisis data dilakukan untuk mengetahui bagaimana peneliti ingin menyajikan hasil karyanya. Analisis data berupaya mendekonstruksi metode penelitian yang digunakan menjadi bagian-bagian komponennya agar struktur atau bentuk objek yang dideskripsikan menjadi eksplisit dan dapat dipahami maknanya. Untuk menghindari bias peneliti jika analisis data tertunda terlalu lama setelah meninggalkan lapangan, sebaiknya dilakukan segera setelah data diperoleh.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data tahap berikutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Data disediakan dalam bentuk teks dan bersifat naratif pada tingkat ini. Diorganisasikan, sistematis, dan ditempatkan dalam pola relasional untuk memudahkan pemahaman.

### c. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penelitian ini berada pada tahap akhir dari berbagai proses dalam pengumpulan data. Penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah peneliti menyusun berbagai catatan, arahan sebab akibat, dan kesimpulan yang digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kesimpulan penelitian harus memberikan jawaban terhadap masalah yang memotivasi penelitian. Selama proses pengumpulan data masih berlangsung, kesimpulan yang diambil bersifat sementara. Oleh karena itu, untuk menarik kesimpulan yang tepat, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap data secara berulang-ulang.